

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundang – undangan :

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Putusan Mahkamah Agung No 477K/Sip/1976

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Surat Dirjen PHPT No.HR.02/153-400/II/2022 mengenai Kartu Peserta BPJS Kesehatan sebagai Syarat Permohonan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena Jual Beli

Buku :

Amal, Bakhrul. *Hukum Tanah Nasional*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.

Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Asyhadie, Zaeni. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Gunakarya, A. Widiada. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi, 2019.

Hadjon, M. Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, Edisi Revisi, 2008.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, Cetakan Pertama, 2010.

Komariyah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Muladi. H, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, Cetakan ketiga, 2009.

Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: Rajagrafindo Persada, Cetakan keempat, 2020.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Liberty, 1985.

Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, Cetakan Keduapuluhsatu, 2005.

Subekti, *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, Cetakan Kesebelas, 2014,

Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2013.

Jurnal

I Komang Edy Susanto, Ida Ayu Putu Widia, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, *Kedudukan Notaris & Ppat Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Jaminan Perlindungan Bagi Para Pihak*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, h.379-383.

Situs WEB

Nur Fitriatus Shalihahh, *Alasan Pemerintah Bakal Wajibkan BPJS untuk Jual Beli'*
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/18/133000665/alasan-pemerintah-bakal-wajibkan-syarat-bpjsuntuk-jual-beli-tanah?page=all>
diakses pada tanggal 18 Juli 2022

